

# JURNAL R A T R I (RISET AKUNTANSI TRIDINANTI)



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG**

# Jurnal

# RATRI

(Riset Akuntansi Tridinanti)

---

Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang

---

## Dewan Redaksi

- Pelindung : Dr. Ir. Hj. Manisah, MP (Rektor)
- Pembina : Dr. Msy. Mikial, S.E., M.Si., Ak., CA (Dekan Fakultas Ekonomi)  
Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, S.E., M.M.
- Pimpinan Umum : Sahila, S.E., M.M.
- Penyunting Ahli : Dr. Yusnaini, S.E., M. Si., Ak. (Universitas Sriwijaya)  
Dr. Anton Arisman, S.E., M.Si. (STIE Multi Data Palembang)  
Dr. Helmi Yazid, S.E., M.Si. (Univ. Sultan Ageng Tirtayasa)  
Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, S.E., M.M. (UTP)
- Penyunting Pelaksana : Meti Zuliyana, S.E, M.Si., Ak., CA  
Rizal Effendi, S.E., M.Si.  
Yancik Syafitri, S.E., M.Si.  
Dwi Septa Ariyani, S.E., M.Si., Ak., CA.
- Sekretariat : Padriansyah, S.E., M.Si.
- Keuangan : Dimas Pratama Putra, S.E., Ak., M.Si.
- Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
- Alamat Redaksi : Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang  
Jl. Kapt. Marzuki No.2446 Kamboja Palembang 30129  
Telp. 0711-354654 E-mail : [redaksiratri@gmail.com](mailto:redaksiratri@gmail.com)

Jurnal “**RATRI**” adalah jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dan kajian analisis kritis dalam bidang Akuntansi. Jurnal ini terbit 2 (dua) kali dalam setahun (Januari, Juli) dan bertujuan untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian dan kajian analisis kritis dalam bidang Akuntansi kepada masyarakat ilmiah.

# Jurnal RATRI

(Riset Akuntansi Tridinanti)

---

Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang

Pengaruh Audit Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Pada PT PLN (Persero) Rayon Blambangan Umpu Provinsi Lampung  
**Sugiharto, S.E., M.Si., Ak., CA**

1-14

---

Analisis Siklus Pengeluaran pada CV. Purwa Daya Sejahtera Palembang  
**Rizal Effendi, S.E., M.Si. Lili Syafitri, SE, MSi. Ak. CA**

15-23

---

Pengaruh *Cash Ratio* Dan *Debt Ratio* Terhadap *Return On Assets* Pada Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019

**Kusminaini Armin, S.E., MM.**

24-41

---

Analisis Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Persediaan Barang Pada Cv. Borneo Bangun Nusa Palembang

**Titi Suelmi, SE, MM, Ak. CA. Shelly F. Tobing, S.E., M.Si. Ak**

42-50

---

Analisis Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Barang Dagang Pada Pt. Electronic City Indonesia, Tbk Cabang Palembang

**Sahila, S.E., MM**

51-62

---

Pengaruh Penerimaan Piutang Terhadap *Service Charge* Karyawan The Alts Hotel Palembang

**Rusmida Hutabarat, SE., M. Si, Ernawati, SE, MM, Ak. CA**

63-79

---

Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada Pt. Sumatra Unggul Palembang

**Reni Hardianti, Koefrowi, SE, Ak. MM**

80-88

---

Pengaruh Biaya Lingkungan Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pemenang Kategori Isra Tahun 2018  
**Amanda Oktariyani, S.E., M.Si., Ak.**

89-96

---

Model Pengaruh Anggaran Biaya Era Covid-19 Terhadap Informasi Akuntansi Pertanggung Jawaban  
**Lesi Hertati, Rilla Gantino, Lilis Puspitawati, Meifida Ilyas**

97-120

---

Pengaruh Hasil Altman Z-Score, Springate, Dan Zmijewski Sebagai Alat Prediksi Kebangkrutan (*Financial Distress*) Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Perusahaan *Property & Real Estate* dan *Food and Beverages* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)  
**Dr. Rilla Gantino, SE., CA. MM, Goei Ivan Jonathan**

120-144

---

## MODEL PENGARUH ANGGARAN BIAYA ERA COVID-19 TERHADAP INFORMASI AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN

Lesi Hertati <sup>\*)</sup>

Rilla Gantino <sup>\*\*)</sup>

Lilis Puspitawati <sup>\*\*\*)</sup>

Meifida Ilyas <sup>\*\*\*\*)</sup>

*hertatilesi@yahoo.co.id*

### ABSTRACK

*The Covid-19 Era budget is one of the government's steps to provide funds to tackle the pandemic by making adjustments or saving on spending by ministries / agencies for 2020. The budget for preventing Covid-19 is budgeted by reducing the allocation of costs to other posts (Refocussing and Reallocation Budget). Flexibility creates opportunities both in terms of timing and size of issuance according to local government financial conditions. Adjustment of the precautionary principle by taking into account the risks and costs, the smallest target achievement is decreasing, but the number of positive patients with Covid-19 is still increasing, making the implementation of official travel difficult, in the end it will affect the results of the results at the end of 2020 impact on responsible accounting information. This study focuses on the Covid-19 cost budget on responsibility accounting information. Survey on local government work units in 3 (three) major cities, namely Palembang, Jakarta, Bandung. The population in this study were 108 local work units, which returned 80 defective samples, the remaining 75 samples were ready to be processed. The data analysis technique used in this study was SEM PLS using descriptive and verification methods. The results of this study indicate that the Covid-19 Era budget affects accountability accounting information.*

**Keyword : Budget Era Covid-19, Accountability Accounting Information**

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kerugian yang luar biasa pada bidang kesehatan, bidang ekonomi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah menyediakan dana

penanggulangan pandemi Covid-19 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2020. Melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat menyebarnya wabah Covid-19 salah satu langkah pemerintah untuk menyediakan dana dalam menanggulangi pandemi dengan

<sup>\*)</sup>, Universitas Indo Global Mandiri

<sup>\*\*)</sup> Universitas Esa Unggul

<sup>\*\*\*)</sup>, Universitas Komputer Indonesia

<sup>\*\*\*\*)</sup>, Universitas Satya Negara Indonesia

melakukan penyesuaian atau penghematan belanja kementerian/lembaga untuk tahun 2020. Penyesuaian belanja pemerintah daerah dengan melakukan revisi penyesuaian/penghematan secara nasional, revisi anggaran dilakukan guna mengakomodir munculnya akun baru guna mendukung pencegahan Covid-19 yang dapat dibiayai dengan dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-*red*) satuan kerja, seperti pembelian masker, *hand sanitizer*, disinfektan, dan persediaan obat-obatan yang sebelumnya tidak dianggarkan. Biaya operasional pencegahan Covid-19 dianggarkan dengan mengurangi alokasi biaya pada pos-pos lainnya (*Refocussing* dan Realokasi Anggaran) (Das, 2020b: Drèze & Sen, 2013: EPW, 2020: Garisson, & Eric, 2010: Heller, 2000).

Anggaran penanganan Covid-19 terdiri memiliki dua mekanisme yakni mekanisme pembayaran langsung dan uang persediaan. Pembayaran langsung dilakukan kepada penyedia barang dan jasa atau pihak lain yang berhak berdasarkan pada perjanjian atau

dasar lain seperti penerbitan surat perintah pembayaran langsung. Pemerintah daerah harus dapat mengelola SKPD dengan baik, sehingga diperlukan informasi mengenai kegiatan-kegiatan satuan kerja pemerintah daerah. Informasi satuan kerja pemerintah daerah dapat digunakan untuk mengawasi, menganalisis, melaksanakan, mengendalikan dan mengambil keputusan. Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam satuan kerja pemerintah daerah harus sesuai dengan rencana agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan agar tidak bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepala daerah bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan satuan kerja pemerintah daerah. Adanya Kepala daerah diharapkan dapat bertanggungjawab apabila ada sesuatu yang menyimpang sehingga dapat ditelusuri dan diadakan perbaikan atas penyimpangan tersebut. (Agrawal, 2007: Calvo, et, all, 2020: Dutta & Fischer, 2021: Engle & Lemos, 2010: Gupta 2013: Hertati, Zarkasy, Adam, Umar, Suharman, 2020).).

---

\*), Universitas Indo Global Mandiri

\*\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*), Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia

Dalam melaksanakan kegiatannya, satuan kerja pemerintah daerah memerlukan biaya dengan alasan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan pemerintah daerah setempat. Untuk memenuhi kebutuhan dan memanfaatkan biaya tersebut, satuan kerja pemerintah daerah sering kali mendapatkan berbagai masalah antara lain sulitnya menutup kekurangan biaya yang dibutuhkan atau memanfaatkan biaya yang dimiliki satuan kerja pemerintah daerah. Untuk mengatasi masalah kekurangan dan kelebihan biaya satuan kerja pemerintah daerah, satuan kerja pemerintah daerah perlu memperhitungkan dengan tepat melakukan taksiran yang cermat atas biaya-biaya yang akan dikeluarkan pada periode selanjutnya. Untuk mengetahui jumlah biaya yang akan dikeluarkan pada periode yang akan datang, pemerintah daerah harus menyusun suatu anggaran.

Fenomena menyatakan permasalahan pada anggaran biaya Era Covid-19 berpengaruh terhadap informasi akuntansi pertanggungjawaban. Fitra (2020)

selaku Sekretaris Jenderal Forum Indonesia menyatakan bahwa transparansi anggaran Covid-19 berpotensi korupsi dalam penanganan anggaran Covid-19. Potensi korupsi saat pemerintah menggelontarkan dana bantuan untuk warga yang mengalami pelemahan ekonomi karena pandemi Covid-19 penggelapan dana bantuan. Anggaran-anggaran sudah ditransfer bermasalah di pelaksanaannya, jumlah bantuan tak sesuai dengan yang diterimakan Kemudin Firly (2020) selaku ketua KPK RI menyatakan bahwa pada Mei 2020 lalu, ada beberapa titik rawan korupsi dalam penanganan pandemi covid-19. Salah satu titik rawan itu terletak pada penyelenggaraan bansos yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian, Wakil Ketua KPK Siregar (2020) mengatakan pihaknya telah menerima 1.074 laporan keluhan masyarakat mengenai bantuan sosial di masa pandemi covid-19. Keluhan itu paling banyak berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Mayoritas pengaduan, terkait pelapor yang tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar.

\*), Universitas Indo Global Mandiri

\*\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*\*), Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia

Persoalan validasi data, karena hal itu penting untuk memastikan penerima yang berhak dan mencegah keluhan yang sama.

Penyaluran bansos masuk dalam klaster perlindungan sosial dalam program penanganan pandemi covid-19. Jika dilihat, dana yang dianggarkan untuk perlindungan sosial paling banyak dibandingkan dengan klaster lain, yakni sebesar Rp233,69 triliun. Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan dana untuk penanganan pandemi covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun. Dana itu terbagi untuk beberapa klaster, misalnya kesehatan Rp97,9 triliun, sektoral k/1 dan pemda Rp65,97 triliun, dukungan UMKM Rp115,82 triliun, insentif usaha Rp120,6 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp61,2 triliun. Realisasi program penanganan pandemi covid-19 hingga 25 November 2020 sebesar Rp431,54 triliun. Angka itu setara dengan 62,1 persen dari total pagu Rp695,2 triliun.

Anggaran yang dibutuhkan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk satuan kerja pemerintah daerah

dalam melaksanakan semua kegiatan secara efektif dan efisien sesuai dengan strategi yang telah ditentukan perusahaan. Penyusunan suatu anggaran dengan memperhatikan kondisi satuan kerja pemerintah daerah dan disusun dengan lengkap dari terperinci akan menghasilkan suatu anggaran yang realisasi. Pencapaian anggaran tidak terlepas dari prosedur penyusunan yang baik dan usaha yang keras guna mewujudkan hal tersebut. (Heller & Chaudhuri, 2007; Fischer & Ali, 2019; Faguet, 2014; Fischer, 2016).

Anggaran merupakan suatu gambaran mengenai kemajuan atau kemunduran dari usaha yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam menentukan tindakan-tindakan selanjutnya, realisasi anggaran merupakan gambaran keadaan yang sebenarnya sehingga perbedaan tersebut dapat berakibat menguntungkan, merugikan atau menghambat kemajuan usaha, dari penilaian tersebut manajemen dapat

---

\*), Universitas Indo Global Mandiri

\*\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*\*), Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia

menentukan tindakan dan mengambil kebijaksanaan agar perencanaan yang dibuat mendekati realisasinya.( Hansen, & Mowen, 2008: Ikhsan, Arfan & Muhammad Ishak, 2009: Isaac & Sadanan, 2020: Hertati, Syafarudin, Safkaur, Fery, 2020: Faguet, 2012).

Untuk mencapai suatu perencanaan dan pengendalian yang efektif dan efisien dalam suatu perusahaan, maka sangat diperlukan informasi akuntansi, salah satunya berupa anggaran yang tepat dan akurat. Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, informasi akuntansi dihubungkan dengan satuan kerja pemerintah daerah yang memiliki wewenang atas terjadinya informasi tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban. Pengendalian biaya dapat dilakukan dengan cara memberikan peran bagi pusat biaya untuk merencanakan biaya yang terjadi yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian menyiapkan informasi realisasi biaya tersebut. Dengan demikian dalam perencanaan dan pengendalian biaya, manajemen memerlukan informasi tentang perusahaan yang berhubungan dengan berbagai biaya

yang dikeluarkan oleh perusahaan.( Joshi, & Schultze, 2014: Khanna,et,all, 2020: Safkaur.O, & Hertati, 2020: Nafarin, 2008: Manor,1999: Hertati, 2015).

Manajemen pemerintah daerah memerlukan informasi tentang SKPD yang berhubungan dengan berbagai biaya yang dikeluarkan oleh SKPD. Informasi penyimpangan yang merupakan selisih antara anggaran biaya dengan realisasinya akan digunakan untuk menilai kinerja dalam periode tersebut dan untuk merencanakan anggaran biaya tahun depan yang lebih baik guna mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengefisienkan dan mengefektifkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka dibutuhkan peranan anggaran dalam hal pelaksanaannya perlu dikendalikan dan dianalisis secara terus-menerus agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah dianggarkan perusahaan. Kemampuan manajer dalam hat biaya ini dapat dinilai dari kinerja manajer pusat biaya.( Muñoz,et,all, 2017: Hertati & safkaur, 2020: Zetzsche, 2020: World Health

\*), Universitas Indo Global Mandiri

\*\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*\*), Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia

Organization, & World Health,2020: Witsoe, 2012: Vogel , 2015 & Henstra: Hertati, Zarkasyi, Suharman, Umar, 2019).

## 2. Tinjauan Pustaka

### Anggaran Biaya Covid-19.

Organisasi yang baik akan melaksanakan kegiatannya dengan cara terstruktur untuk pengambilan keputusan dengan perhitungan dan pertimbangan perencanaan dan pengendalian yang tepat, contohnya dengan merencanakan anggaran yang efektif dan efisien. Perbandingan dan analisa biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan memberikan informasi bagi manajemen untuk memungkinkan mereka mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dan rencana kegiatan, yang pada gilirannya dapat digunakan oleh manajemen sebagai dasar untuk melakukan tindakan koreksi. Mulyadi (2011) detinisi anggaran sebagai berikut :Anggaran biaya adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun. Sedangkan menurut Garrison dan

Noreen (2010) menyatakan bahwa: anggaran biaya adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu.

Hansen dan Mowen (2008: Lancet 2020). berpendapat bahwa anggaran biaya adalah rencana keuangan untuk masa depan, rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Anggaran biaya merupakan rencana kerja tentang aktivitas kegiatan yang dilakukan di waktu yang akan datang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam unit moneter (kesatuan) yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam berdasarkan jangka waktu tertentu. Anggaran biaya dalam suatu perusahaan mutlak sekali diperlukan karena berfungsi sebagai pedoman di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan. Anggaran sebagai alat bantu manajemen dalam mengukur dan menentukan tingkat pembiayaan operasional dapat diterapkan

---

\*), Universitas Indo Global Mandiri

\*\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*), Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia

terhadap berbagai macam bentuk badan usaha, terutama pada perusahaan yang telah maju yang pelaksanaannya akan berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. (Maiorano, & Masiero 2018: Manor, 2010).

Suatu perusahaan yang bekerja dengan menggunakan anggaran formal biasanya akan dengan cepat yakin betapa besar manfaat yang didapat dari suatu anggaran, dan sama sekali tidak akan mempunyai pikiran untuk kembali kebiasaan yang lama, yaitu bekerja tanpa anggaran. Singkatnya meskipun perusahaan bias mencapai tingkat kesuksesan tertentu tanpa menggunakan anggaran, mereka tidak akan pernah mencapai tingkat kesuksesan setinggi yang dapat dicapai dengan sistem anggaran yang terkoordinasi. Anggaran yang baik harus mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan, untuk itu penyusunan data dan informasi intern yang digunakan harus mencerminkan seluruh kekuatan dan kelemahan perusahaan dan ditunjang dengan data dan informasi ektern yang diperoleh dari luar perusahaan (Roy & Dave, 2020:

Rudianto, 2009). Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses penganggaran. Sekali anggaran ditetapkan, pencapaian sasaran anggaran hanya dapat dilakukan melalui serangkaian aktivitas yang telah ditetapkan sebelumnya dalam anggaran. Rudianto (2009) Hansen & Mowers, (2008 ) untuk memperoleh konsep yang lebih jelas mengenai anggaran dengan melihat adanya beberapa karakteristik anggaran sebagai berikut:

1. Anggaran biaya dinyatakan dalam satuan moneter  
Bertujuan untuk mempermudah membaca dan usaha untuk mengerti rencana tersebut. Karena itu sebaiknya anggaran disusun dalam bentuk kuantitatif moneter yang ringkas.
2. Anggaran umumnya mencakup kurun waktu satu tahun  
Bukan berarti anggaran tidak dapat disusun untuk kurun waktu lebih pendek. Batasan waktu di dalam penyusunan anggaran akan berfungsi untuk memberikan batasan rencana kerja tersebut.
3. Anggaran biaya mengandung

\*), Universitas Indo Global Mandiri

\*\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*\*), Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia

komitmen atau kesanggupan manajemen

Anggaran harus disertai dengan upaya pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai apa yang telah ditetapkan. Tanpa upaya serius dari pihak manajemen untuk mencapainya maka penyusunan anggaran tidak akan banyak manfaatnya bagi perusahaan.

4. Usulan anggaranbiaya disetujui oleh pejabat/pihak yang berwenang lebih tinggi dari pelaksanaan anggaran, anggaran tidak dapat disusun sendiri-sendiri oleh setiap bagian organisasi tanpa persetujuan dari atasan pihak penyusun.
5. Setelah disetujui Anggaran hanya diubah jika ada keadaan khusus, anggaran biaya boleh diubah jika situasi internal dan eksternal organisasi memaksa untuk mengubah anggaran tersebut karena jika dipertahankan akan membuat anggaran tidak relevan lagi dengan situasi yang ada.
6. Jika terjadi penyimpangan /*varians* di dalam

pelaksanaannya,

Harus dianalisis sebab terjadinya penyimpangan tersebut, agar tidak terulang lagi di masa yang mendatang dan agar penyusunan anggaran dikemudian hari menjadi lebih relevan dengan situasi yang ada.

#### 7. Anggaran Operasional

Anggaran ini mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan: penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi dan lain-lain serta berupa anggaran biaya dan laba. Hasil akhir anggaran operasional adalah suatu perkiraan laporan laba rugi.

#### 8. Anggaran Keuangan

Anggaran yang merinci aliran masuk dan aliran keluar kas serta posisi keuangan secara umum. Perkiraan aliran masuk dan keluar kas diperlihatkan dalam anggaran kas. Posisi keuangan yang diharapkan pada akhir periode anggaran ditunjukkan dalam perkiraan neraca. Serta anggaran modal mengenal rincian untuk pembelian aktiva jangka panjang dan membeli hal

---

\*), Universitas Indo Global Mandiri

\*\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*\*), Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia

lainnya untuk periode di masa mendatang.

### **Informasi Akuntansi Pertanggung Jawaban**

Informasi diperlukan oleh manajemen dalam mengelola suatu organisasi, terutama dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang bermanfaat adalah informasi yang diolah terlebih dahulu agar siap untuk dijadikan dasar dalam membuat kesimpulan, argumen, peramalan, keputusan, atau tindakan, baik yang berorientasi jangka panjang dihasilkan pendek. Informasi akuntansi merupakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Tanggung jawab timbul karena adanya pendelegasian wewenang dari suatu tingkat manajemen yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Untuk mengetahui tanggung jawabnya, manajemen bawah harus mengetahui dengan jelas wewenang apa yang harus didelegasikan oleh atasannya. Manajemen bawah harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan wewenang yang diberikan kepadanya. Oleh

karenanya, timbul kebutuhan organisasi akan wewenang informasi akuntansi untuk menilai pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang.

Anthony dan Govindarajan (2008) definisi dari pusat tanggungjawab menyatakan bahwa pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas yang di lakukan. Garrison dan Noreen (2010) menyatakan bahwa pusat pertanggungjawaban secara luas mengatakan bahwa pusat pertanggungjawaban sebagai bagian dari suatu organisasi yang manajernya memiliki kendali atas biaya, penerimaan, atau dana investasi. Hansen dan Mowen (2008) definisi pusat pertanggungjawaban adalah merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggungjawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu.( Perry,et,all, 2016: Quinn,et,all, 2013: Ranscombe, 2020).

Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan

\*), Universitas Indo Global Mandiri

\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*), Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia

bagian dari unit organisasi, dimana manajer harus bertanggungjawab dan memiliki kendali atas biaya, penerimaan, atau dana investasi terhadap segala aktivitas yang dilakukannya atau berdasarkan tanggungjawabnya. Unit-unit kegiatan yang dipimpin oleh manajer yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di dalamnya merupakan suatu pusat pertanggungjawaban, karena pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang menjalankan fungsi yang dibebankan kepadanya dan mempertanggungjawabkan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi, termasuk adanya biaya-biaya yang dibatasi dan dikendalikan melalui anggaran. Mulyadi (2011) terdapat empat jenis utama pusat pertanggungjawaban yaitu:

#### 1. Pusat Biaya

Suatu pusat pertanggungjawaban yang ukuran prestasi manajernya didasarkan pada biayanya (nilai masukan). Setiap pusat pertanggungjawaban mengkonsumsi masukan dan menghasilkan keluaran. Dalam pusat biaya, keluarannya tidak dapat atau tidak perlu diukur

dalam bentuk pendapatan. Hal ini disebabkan karena kemungkinan keluaran pusat biaya tersebut tidak dapat diukur secara kuantitatif, atau kemungkinan manajer pusat biaya tersebut tidak dapat bertanggungjawab atas keluaran pusat biaya tersebut.

#### 2. Pusat Pendapatan

Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang ukuran prestasinya manajernya didasarkan pada pendapatannya. Manajer pusat pendapatan tidak dimintai pertanggungjawaban mengenai masukannya, karena dia tidak dapat mempengaruhi pemakaian masukan tersebut. Contoh pusat pendapatan adalah departemen pemasaran.

#### 3. Pusat Laba

Pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pusat pertanggungjawaban tersebut. Manajer pusat laba diukur kinerjanya dari selisih antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

\*), Universitas Indo Global Mandiri

\*\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*\*), Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia

pendapatan tersebut. Oleh karena itu dalam pusat laba, baik masukan maupun keluarannya diukur dalam satuan rupiah untuk menghitung laba, yang dipakai sebagai pengukur kinerja manajernya.

Dalam akuntansi keuangan pendapatan hanya diakui dan dicatat pada saat pendapatan tersebut direalisasikan melalui transaksi penjualan produk atau jasa kepada pihak luar perusahaan.

#### 4. Pusat Investasi

Pusat investasi adalah pusat laba yang diukur prestasinya dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat pertanggungjawaban tersebut dengan investasi yang bersangkutan. Ukuran prestasi manajer pusat investasi dapat berupa ratio antara laba dengan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Ukuran ini disebut *return on investment* (ROI) dimana laba dibagi dengan investasi atau diukur dengan menggunakan *residual income* dimana laba

dikurangi dengan beban modal (*capital charge*) atau produktivitas yang merupakan ratio antara keluaran dengan masukan.

#### 5. Informasi Operasi

Untuk melaksanakan aktivitas perusahaan sehari-hari, manajemen memerlukan berbagai informasi operasi seperti jumlah bahan baku yang dipakai dalam produksi, jumlah persediaan (*inventory*) produk jadi yang ada di gudang, jumlah produksi suatu periode, jumlah jam kerja karyawan dalam satu periode, dan jumlah produk yang dijual dalam satu periode.

#### 6. Informasi Akuntansi Keuangan

Informasi akuntansi keuangan diperlukan baik oleh manajemen (biasanya manajemen puncak) maupun pihak luar perusahaan seperti pemegang saham, bankir, dan kreditur yang lain, instansi pemerintah, dan pihak luar lainnya. Informasi akuntansi keuangan ini diperlukan oleh pihak luar untuk pengambilan keputusan guna menentukan hubungan antara pihak luar

---

\*), Universitas Indo Global Mandiri

\*\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*\*), Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia

tersebut dengan perusahaan. Informasi akuntansi keuangan ini dihasilkan oleh sistem informasi keuangan yang disebut akuntansi keuangan, yang disajikan dalam laporan keuangan.

#### 7. Informasi Akuntansi Manajemen

Informasi akuntansi manajemen diperlukan oleh manajemen untuk melaksanakan dua fungsi pokok manajemen dalam hal perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan. Informasi akuntansi manajemen ini dihasilkan oleh sistem pengolahan informasi keuangan yang disebut akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen disajikan kepada manajemen perusahaan dalam berbagai laporan keuangan seperti anggaran, laporan penjualan, laporan biaya menurut pusat pertanggungjawaban, laporan biaya menurut kegiatan, dan laporan biaya pemasaran.

Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu fakta, data pengamatan,

persepsi, atau sesuatu yang lain, yang menambah pengetahuan informasi yang diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan selalu menyangkut masa yang akan datang, yang mengandung ketidakpastian, dan selalu menyangkut pemilihan suatu alternatif tindakan di antara sekian banyak alternatif yang tersedia. Pengambil keputusan selalu berusaha mengumpulkan informasi untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapinya dalam memilih alternatif tindakan tersebut. Informasi akuntansi pertanggungjawaban diperlukan guna pengambil keputusan. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu informasi kuantitatif, dan akuntansi manajemen merupakan salah satu tipe informasi-informasi akuntansi di antara dua tipe informasi yang lain yaitu informasi operasi dan informasi akuntansi keuangan. ( Van Bavel, et,all 2020: Sumner & Ortiz, 2020: Singh & Sharma, 2007: Sibley, et,all, 2020).

Manajemen memerlukan Informasi akuntansi

\*), Universitas Indo Global Mandiri

\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*), Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia

pertanggungjawaban baik yang berupa informasi kuantitatif maupun Informasi nonkuantitatif sebagai dasar pengambilan keputusan. Umumnya informasi kuantitatif lebih berperan dalam mengurangi ketidakpasatian bila dibandingkan dengan informasi nonkuantitatif, sehingga umumnya dalam pengambilan keputusan bisnis, manajemen lebih bertumpu pada informasi kuantitatif yang menjadikan pengambil keputusan lebih memperoleh jaminan kepastian dalam pemilihan alternatif dibandingkan dengan informasi nonkuantitatif. Hipotesis bagaimana pengaruh Anggaran Biaya Era Covid-19 terhadap Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dan Verifikatif suatu cara penelitian yang memusatkan pada masalah yang ada dengan menggambarkan urutan

tahapannya berupa mengumpulkan data, mengklasifikasi, membandingkan, mengolah data dan menganalisis data-data dan dengan 5 pertanyaan 1 sampai 5 sehingga dapat menjawab fenomena dan mencari pemecahan yang ada. Informasi akuntansi pertanggungjawaban diperlukan guna pengambil keputusan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel (Arikunto, Suharsimi, 2008). Penentuan ukuran sampel menggunakan pendekatan Taro Yamane. Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

Di mana:

n = Sampel

N = Jumlah populasi

$d^2$  = Presisi (ditetapkan 5%)

---

\*), Universitas Indo Global Mandiri

\*\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*), Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian, 2021

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. DATA ANALYSIS

Dalam rangka menganalisis data perusahaan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif menganalisis objek penelitian dengan cara memaparkan berdasarkan teori yang tepat atas data-data yang, diperoleh dalam rangka memperoleh pengetahuan mengenai peranan anggaran yang dihubungkan dengan penilaian kinerja manajer pusat biaya, serta membandingkan anggaran biaya dengan realisasinya. Sehingga dapat menjawab dan mencari pemecahan yang ada. Penelitian ini focus pada anggaran biaya Covid-19 pada informasi

akuntansi pertanggungjawaban. Survey pada satuan kerja pemerintah daerah di 3(tiga) kota besar yaitu Palembang, Jakarta, Bandung, Populasi dalam penelitian ini adalah satuan kerja perangkat daerah sebanyak 108 sampel yang mengembalikan sebanyak 80 sampel yang cacat 5 sampel sisanya 75 sampel siap diolah. Teknik analisis data yang digunakan didalam penelitian ini memakai SEM PLS dengan memakai metode descriptive and verification method (Azwar, Syaifuddin, 2007). Secara keseluruhan, proses pengumpulan data telah diambil selama 4 bulan dan penelitian ini tidak didanai oleh

\*), Universitas Indo Global Mandiri

\*\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*\*), Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia

organisasi apa pun. Hasil pengolahan data terlihat tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji *Loading factor*

No.	<i>Loading factor</i> masing-masing indikator	Anggaran Biaya Era Covid-19	Informasi Akuntansi Pertanggung Jawaban
1.	Indikator 1	0.731	0.802
2.	Indikator 2	0.894	0.810
3.	Indikator 3	0.796	0.792
4.	Indikator 4	0.627	0.861
5.	Indikator 5	0.452	0.773
6.	Indikator 6	0.371	0.684
7.	Indikator 7	0.727	0.766
8.	Indikator 8	0.827	0.762
9.	Indikator 9	0.827	0.382
10.	Indikator 10	0.827	0.682
11.	Indikator 11	0.382	0.682
12.	Indikator 12	0.382	0.782
13.	Indikator 13	0.382	0.766
14.	Indikator 14	0.382	0.766
15.	Indikator 15	0.382	-
16.	Indikator 16	0.382	-

Sumber: Olah data SPSS, 2020

Tabel 2 Hasil Uji. Hasil Square roots of AVE

No	Variabel	Square roots of AVE
1.	Anggaran Biaya Era Covid-19	0.729
2.	Informasi Akuntansi Pertanggung Jawaban	0.849

Sumber: Olah data SPSS, 2020

Tabel 3. Hasil Uji *Composite Reliability*

No.	Variabel	Composite reliability	Cronbach's Alpha
1.	Anggaran Biaya Era Covid-19	0.816	0.982
2.	Informasi Akuntansi Pertanggung Jawaban	0.810	0.986

Sumber: Olah data SPSS, 2020

\*), Universitas Indo Global Mandiri

\*\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*\*), Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia

Tabel 4. model diukur menggunakan R square

No.	Model	R square
1.	Informasi Akuntansi Pertanggung Jawaban	0.169

Sumber: Olah data SPSS, 2020

Tabel 5. Hasil Uji Q square

No.	Model	Q square
1.	Informasi Akuntansi Pertanggung Jawaban	0.349

Sumber: Olah data SPSS, 2020

Tabel 6. Hasil Pengujian Pengaruh langsung

No.	Pengaruh Langsung	Koefisien	Signifikansi	Keterangan
1	Informasi Akuntansi Pertanggung Jawaban	-0.508	0.044	Diterima

Sumber: Olah data SPSS, 2020

Pengujian yang dilakukan dalam melihat nilai  $R^2$ , model PLS juga dievaluasi dengan melihat  $Q^2$  *predictive relevance* untuk model konstruk.  $Q^2$  mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai  $Q^2 > 0$  (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai *predictive relevance*, Hasil AVE menunjukkan bahwa indikator yang dimiliki oleh masing-masing variabel dapat mengukur variabel yang dimaksud. *Discriminat validity* adalah membandingkan nilai *square root of average variance extracted* (AVE)

setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Dimana nilai AVE harus  $> 0,50$ . Hasil composite reliability menunjukkan bahwa masing-masing indikator dapat mengukur variabel dengan andal.

Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh variabel dalam hipotesis semakin baik anggaran biaya era covid-19, maka semakin baik informasi akuntansi pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 0.054. Oleh sebab itu hipotesis untuk pengaruh langsung dalam variabel ini

\*), Universitas Indo Global Mandiri

\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*), Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia

diterima. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha  $>0,60$ . *Structural Equation Model* (SEM) dengan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software warp* PLS 5.0. PLS merupakan *factor indeterminacy* metode analisis yang *powerful* oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu dan jumlah sampel kecil (Sugiono 2017). Hal ini dirasakan sangat penting oleh responden untuk mencapai anggaran biaya Era Covid-19 yang maksimal maka akan berdampak pada realisasi informasi akuntansi pertanggungjawaban.

## 2. DISKUSI

Manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi di masa yang akan datang adalah untuk penyusunan anggaran. Selanjutnya informasi yang berupa informasi masa lalu sebagai penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dan pemotivasi manajer. Mulyadi (2011:174) informasi akuntansi pertanggungjawaban memiliki manfaat sebagai sebagai dasar

penyusunan anggaran, sebagai penilai kinerja pusat pertanggungjawaban, sebagai pemotivasi manajer. Proses penyusunan anggaran biaya pada dasarnya merupakan proses penetapan peran dalam usaha pencapaian sasaran Pemerintah daerah. Penyusunan anggaran hanya mungkin dilakukan jika tersedia informasi akuntansi pertanggungjawaban, yang mengukur berbagai nilai sumber daya yang disediakan bagi manajer yang berperan dalam usaha pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran. Dengan demikian, anggaran berisi informasi akuntansi pertanggungjawaban yang mengukur nilai sumber daya yang disediakan selama tahun anggaran bagi manajer yang diberi peran untuk mencapai sasaran perusahaan. Dalam proses penyusunan anggaran, informasi akuntansi pertanggungjawaban berfungsi sebagai alat pengirim peran kepada manajer yang diberi peran dalam pencapaian sasaran perusahaan. (Tselios & Tompkins, 2017: Williams, C. C., & Gurtoo, 2011: Hertati, Widiyanti..Desfitrina.

---

\*), Universitas Indo Global Mandiri

\*\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*), Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia

Syafarudin. 2020: Hansen, & Mowen, 2009).

Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan bagi setiap manajer untuk merencanakan pendapatan, dan/atau biaya tersebut menurut manajer yang bertanggungjawab. Dengan demikian, informasi akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan skor (*score*) yang dibuat oleh manajer dalam menggunakan berbagai sumber daya untuk melaksanakan peran manajer tersebut dalam mencapai sasaran perusahaan. Informasi akuntansi yang dihubungkan dengan manajer yang memiliki peran digunakan untuk mengukur kinerja manajer. Informasi akuntansi disebut dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan

bagian yang sangat penting, dengan informasi akuntansi dapat menggambarkan motivasi kepala daerah. (Mulyadi. 2011: Peña,et,all, 2020: Peña,et,all, 2020: Hertati.L, Iriadi , Safkaur.O, Fery, Antasari, Nazarudin, 2020).

Munculnya pengaruh langsung Informasi akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan motivasi pemerintah daerah dengan mempengaruhi penghargaan kinerja. Penghargaan sebagian didasarkan atas informasi akuntansi pertanggungjawaban pemerintah daerah akan berkeyakinan bahwa kinerjanya yang diukur dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban (informasi masa lalu) akan diberi penghargaan yang sebagian besar didasarkan atas informasi akuntansi. Kemungkinan kinerja akan memperoleh penghargaan inilah yang memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja. Secara tidak langsung, informasi akuntansi pertanggungjawaban berdampak terhadap motivasi melalui nilai penghargaan. Informasi akuntansi pertanggungjawaban (berupa informasi masa lalu) digunakan

\*), Universitas Indo Global Mandiri

\*\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*), Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia

untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Struktur penghargaan sebagian besar didasarkan atas informasi akuntansi, manajer akan memperoleh kepuasan. Kepuasan manajer atas penghargaan yang diterimanya dipengaruhi oleh penilaian manajer atas kepastian penghargaan tersebut. (Kruks-Wisner, 2015: Anthony, & Govindarajan, 2009: Agrawal & Ribot, 1999: Barnett-Howell & Mobarak, 2020: Corbridge & Veron, 2005: Agarwal, 2012).

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Fungsi anggaran sebagai hasil akhir proses penyusunan rencana kerja agar menghasilkan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Anggaran merupakan cetak biru (*blue print*) aktivitas yang akan dilaksanakan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Anggaran berfungsi sebagai alat berkomunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit satuan kerja perangkat daerah dalam pemerintah daerah dan yang menghubungkan kepala dinas dengan pemerintah daerah. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil

operasi sesungguhnya. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi pemerintah daerah. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi satuan kerja pemerintah daerah dan ASN agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pemerintah daerah. Hubungan antara anggaran dengan informasi akuntansi pertanggung jawaban Era Covid-19 keluarannya, pusat biaya yaitu pusat biaya pemerintah daerah adalah pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar masukannya mempunyai hubungan yang nyata dan erat dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Contoh pusat biaya satuan kerja perangkat daerah adalah pusat biaya kebijakan dalam satuan kerja informasi akuntansi. Informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai pusat biaya kebijakan tidak dapat diukur prestasinya berdasarkan efisiensinya karena tidak adanya hubungan yang nyata antara masukan dan keluaran atau karena keluaran pusat biaya

\*), Universitas Indo Global Mandiri

\*\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*\*), Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia

kebijakan tidak dapat diukur secara kuantitatif.

### E. DAFTAR RUJUKAN

- Anthony, Robert N. dan Vijay Govindarajan. (2009). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi kesebelas. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Agrawal, A. (2007). Forests, governance, and sustainability: Common property theory and its contributions. *International Journal of the Commons*, 1(1), 111–136.
- Agrawal, A., & Ribot, J. (1999). Accountability in decentralization: A framework with South Asian and West African cases. *The Journal of Developing Areas*, 33, 473–502.
- Agarwal, A., Perrin, N., Chhatre, A., Benson, C. S., & Kononen, M. (2012). Climate policy processes, local institutions, and adaptation actions: Mechanisms of translation and influence. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 3(6), 565–579.
- Arikunto, Suharsimi, 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Syaifuddin, (2007). *Validitas dan Reliabilitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barnett-Howell, Z., & Mobarak, A. M. (2020). The Benefits and costs of social distancing in rich and poor countries. arXiv preprint arXiv:2004.04867.
- Calvo, R. A., Deterding, S., & Ryan, R. M. (2020). Health surveillance during COVID-19 pandemic.
- Corbridge, S., Williams, G., Srivastava, M., & Véron, R. (2005). *Seeing the state: Governance and governmentality in India*. Cambridge University Press.
- Das, V. (2020b). Facing COVID-19: My Land of neither hope nor despair. *American Ethnologist website*, 1.
- Drèze, J., & Sen, A. (2013). *An uncertain glory: India and its contradictions*. Princeton University Press.
- Dutta, A & Fischer A.W.(2021).The local governance of COVID-19: Disease prevention and social security in rural India. *World Development*. World Development journal homepage: [www.elsevier.com/locate/worlddev](http://www.elsevier.com/locate/worlddev) 138 (2021) .1-11
- Engle, N. L., & Lemos, M. C. (2010). Unpacking governance: Building adaptive capacity to climate change of river basins in Brazil. *Global Environmental Change*, 20(1), 4–13.
- EPW (2020). Editorial: COVID-19 and national disaster management act. *Economic and Political Weekly*, 55(19).
- Garisson, Ray H. dan Eric W. Noreen. (2010). *Akuntansi Manajerial*. Terjemahan A. Totok Budisantoso. Buku

\*), Universitas Indo Global Mandiri

\*\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*\*), Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia

- Satu. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Gupta, A. (2013). Red tape: Bureaucracy, structural violence, and poverty in India. Duke University Press.
- Heller, P. (2000). Degrees of democracy: Some comparative lessons from India. *World Politics*, 52, 484–519.
- Heller, P., Harilal, K. N., & Chaudhuri, S. (2007). Building local democracy: Evaluating the impact of decentralization in Kerala, India. *World Development*, 35, 626–648.
- Fischer, H. W., & Ali, S. S. (2019). Reshaping the public domain: Decentralization, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), and trajectories of local democracy in rural India. *World Development*, 120, 147–158.
- Faguet, J. P. (2012). Decentralization and popular democracy: Governance from below in Bolivia. University of Michigan Press.
- Faguet, J. P. (2014). Decentralization and governance: a special issue of *World Development*, 2013. *World Development*, 53.
- Fischer, H. W. (2016). Beyond participation and accountability: Theorizing representation in local democracy. *World Development*, 86, 111–122.
- Fitra (2020). Ini Potensi Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19 Menurut Fitra <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/09/21255061/ini-potensi-korupsi-anggaran-penanganan-covid-19-menurut-fitra>.
- Firly (2020). Bansos Covid-19 di Pusaran Korupsi dan OTT Pejabat Kemensos. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020/12/05/121418-12-578353/bansos-covid-19-di-pusaran-korupsi-dan-ott-pejabat-kemensos>
- Hansen, Don R. dan Maryanne M. Mowen. (2008). *Akuntansi Manajemen*. Buku Satu. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hansen, Don R. dan Maryanne M. Mowen. (2009). *Akuntansi Manajemen*. Buku Dua. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hertati. L (2015). Competence of Human Resources, The Benefits of Information Technology on Value of Financial Reporting in Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting* 6, (8) 12-18
- Hertati.L.  
Zarkasyi.W.Suharman.H.Umar.H. (2019). The Effect of Human Resource Ethics on Financial Reporting Implications for Good Government Governance (Survey of Related Sub-units in State-owned Enterprises in SUMSEL). *International Journal of Economics and Financial*. 9(4), 267-276
- Hertati, L. Widiyanti.M.Desfitriana. Syafarudin.A. (2020). The Effects Of Economic Crisis On Business Finance. *International Journal of Economics and Financial Issues* 10, (3) 236-244.

---

\*) Universitas Indo Global Mandiri

\*\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*\*), Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia

- Safkaur.O, & Hertati.L.(2020). Perubahan Struktur Modal Menyebabkan Perubahan Kinerja Keuangan Jurnal Ekonomi Dan Perbankan 9(2) 94-105
- Hertati.L , Zarkasy.W, Adam.M., Umar.H, Suharman.H.(2020). Decrease in Labor Levels in the Covid-19 Government Budget. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*. 1 ( 4) . 193-209
- Hertati.L, Syafarudin.A, Safkaur.O. Fery.I.( 2020). Peran Manajemen Perubahan Pada Akuntansi Manajemen Strategis Akibat Virus Corona . Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi 1 (2). 201-216.
- Hertati.L, Iriadi2 , Safkaur.O, Fery.I., Antasari.R Nazarudin.(2020). Peran Akuntansi Aktiva Tetap, Standar Akuntansi Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Akibat Covid-19. Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi 1 (2).182-200
- Hertati.L.Safkaur.O.(2020). Dampak Revolusi Industri 4.0 Era Covid-19 Pada Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Struktur Modal Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan keuangan* 8 (3), 2020, 503-518
- Ikhsan, Arfan dan Muhammad Ishak. (2009). *Akuntansi Keperilakuan*. Jilid Satu. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Isaac, T., & Sadanandan, R. (2020). COVID-19, Public Health System and Local Governance in Kerala. *Economic & Political Weekly*, 55(21), 11.
- Lili.P.S (2020). Bansos Covid-19 di Pusaran Korupsi dan OTT Pejabat Kemensos. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201205121418-12-578353/bansos-covid-19-di-pusaran-korupsi-dan-ott-pejabat-kemensos>
- Joshi, A., & Schultze-Kraft, M. (2014). Introduction-Localising Governance: An Outlook on Research and Policy. *IDS Bulletin*, 45(5), 1–8.
- Khanna, S. S., Babu, P. S., Kundu, A., Hazarika, S. J., Barman, D., & Rathod, S. (2020). Numerous vaccine and drug trials for COVID-19 in the World: A review. *Journal of Advanced Medical and Dental Sciences Research*, 8(5).
- Kruks-Wisner, G. (2015). Navigating the State: Citizenship practice and the pursuit
- Lancet (2020). Editorial: India under COVID-19 lockdown. *Lancet* (London, England), 395(10233), 1315.
- Longstaff, P. H., & Yang, S. (2008). Communication Management and Trust: Their Role in Building Resilience to. Surprises” such as Natural Disasters, Pandemic Flu, and Terrorism,
- Nafarin. M. (2008). *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mulyadi. 2011. *Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat & Rekayasa*. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

\*), Universitas Indo Global Mandiri

\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*) Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia

- Maiorano, D., Das, U., & Masiero, S. (2018). Decentralisation, clientelism and social protection programmes: A study of India's MGNREGA. *Oxford Development Studies*, 46(4), 536–549.
- Manor, J. (1999). *The political economy of democratic decentralization*. Washington DC: The World Bank.
- Manor, J. (2010). Local governance. In N. G. Jayal & P. B. Mehta (Eds.), *The oxford companion to politics in India* (pp. 61–79). Oxford: Oxford University Press.
- Muñoz, D. C., Amador, P. M., Llamas, L. M., Hernandez, D. M., & Sancho, J. M. S. (2017). Decentralization of health systems in low and middle income countries: A systematic review. *International journal of public health*, 62(2), 219–229.
- Peña, S., Cuadrado, C., Rivera-Aguirre, A., Hasdell, R., Nazif-Munoz, J. I., Yusuf, M., & Vásquez, H. (2020). PoliMap: A taxonomy proposal for mapping and understanding the global policy response to COVID-19.
- Perry, H. B., Dhillon, R. S., Liu, A., Chitnis, K., Panjabi, R., Palazuelos, D., ... Nyenswah, T. (2016). Community health worker programmes after the 2013–2016 Ebola outbreak. *Bulletin of the World Health Organization*, 94(7), 551.
- Quinn, S. C., Parmer, J., Freimuth, V. S., Hilyard, K. M., Musa, D., & Kim, K. H. (2013). Exploring communication, trust in government, and vaccination intention later in the 2009 H1N1 pandemic: Results of a national survey. *Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science*, 11(2), 96–106.
- Ranscombe, P. (2020). Rural areas at risk during COVID-19 pandemic. *The Lancet Infectious Diseases*, 20(5), 545.
- Roy, A., & Dave, S. K. (2020). When people and governments come together. *Economic & Political Weekly*, 55(18), 11.
- Rudianto. 2009. *Akuntansi Manajemen Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sibley, C. G., Greaves, L. M., Satherley, N., Wilson, M. S., Overall, N. C., Lee, C. H., ... Houkamau, C. A. (2020). Effects of the COVID-19 pandemic and nationwide lockdown on trust, attitudes toward government, and well-being. *American Psychologist*.
- Singh, S., & Sharma, P. (2007). *Decentralization: Institutions and politics in rural India*. Delhi: Oxford University Press.
- Sumner, A., Hoy, C., & Ortiz-Juarez, E. (2020). Estimates of the Impact of COVID-19 on Global Poverty.
- Tselios, V., & Tompkins, E. (2017). Local government, political decentralisation and resilience to natural hazard-associated

\*), Universitas Indo Global Mandiri

\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*), Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia

- disasters. *Environmental Hazards*, 16(3), 228–252.
- Van Bavel, J. J., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., Drury, J. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. *Nature Human Behaviour*, 1–12.
- Vogel, B., & Henstra, D. (2015). Studying local climate adaptation: A heuristic research framework for comparative policy analysis. *Global Environmental Change*, 31, 110–120.
- Williams, C. C., & Gurtoo, A. (2011). Evaluating women entrepreneurs in the informal sector: Some evidence from India. *Journal of Developmental Entrepreneurship*, 16(03), 351–369.
- Witsoe, J. (2012). Everyday corruption and the political mediation of the Indian state. *Economic & Political Weekly*, 47(6), 47.
- World Health Organization, & World Health Organization. (2020). Report of the WHO-China joint mission on coronavirus disease 2019 (COVID-19).
- Zetsche, D. A. (2020). One Million or One Hundred Million Casualties?—the Impact of the COVID-19 Crisis on Low-and Middle-Income Countries—. Available at SSRN 3597657.

---

\*), Universitas Indo Global Mandiri

\*\*\*) Universitas Esa Unggul

\*\*\*\*), Universitas Komputer Indonesia

\*\*\*\*\*), Universitas Satya Negara Indonesia

**PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI UTP**

1. **Artikel dapat diangkat dari hasil penelitian atau kajian analitis kritis** di bidang ilmu Ekonomi yang berhubungan dengan bidang Perbankan, Manajemen dan Akuntansi yang dianggap perlu didesimanisasikan.
2. **Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris**, minimal 10 halaman dan maksimal 15 halaman termasuk daftar pustaka dan lampiran; ukuran kertas A4, spasi 1,5; margin kiri 4 cm, margin kanan, atas dan bawah masing-masing 3 cm, menggunakan Times New Roman *font* 12
3. **Artikel diketik dengan komputer program MS. Word**  
Penulis dimohon mengirimkan satu print out dan satu CD yang berisi artikel.  
Cantumkan alamat, email dan nomor telepon/HP penulis untuk keperluan konfirmasi tentang tulisan yang dikirimkan ke redaksi.
4. **Artikel dilengkapi :**  
Abstrak maksimum 150 kata, dan kata-kata kunci  
Biodata singkat penulis dan identitas penelitian dicantumkan sebagai catatan kaki pada halaman pertama artikel.
5. **Penulisan Daftar Rujukan** mengikuti urutan:
  - a) *Last name, first name, middle name*
  - b) Tahun penerbitan
  - c) Judul buku (huruf miring),
  - d) Kota penerbitan dan
  - e) Nama penerbit (bila buku) atau judul artikel, judul jurnal, beserta volume, nomor edisi dan halaman (bila artikel).

**Contoh :**  
Brigham & Houston, 2006, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Jakarta, Salemba Empat.  
Mikial, Msy, 2010, *Evaluasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Daerah (Lazda) Sumsel Dompot Sosail Insani Mulia (DSIM) Palembang*, Palembang, Majalah UTP, No. 64,2010, 92-101.
6. **Artikel hasil penelitian** memuat :
  - Judul** (maks 14 kata)
  - Nama penulis** (tanpa gelar)
  - Alamat email** yang dapat dihubungi
  - Abstrak** (Bhs Inggris, satu paragraf)
  - Kata-kata kunci**
    - A. Pendahuluan** (memuat latar belakang masalah, dan sedikit tinjauan pustak, serta masalah dan tujuan penelitian)
    - B. Metode penelitian**
    - C. Hasil dan pembahasan**
    - D. Simpulan dan Saran**
    - E. Daftar rujukan** (berisi pustaka yang betul-betul dirujuk dalam naskah)
  - Lampiran** (bila perlu)
7. **Artikel Kajian Analisis Kritis** di bidang Ilmu Ekonomi yang dianggap perlu didesimanisasikan memuat: **Judul, Nama penulis** dan **alamat email** yang dapat dihubungi

